EDISI SENIN 12 OKTOBER 2026

HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

02 GOVERMENTTODAY
Prabowo-El-Sisi Bidik Dana Investasi Bersama, Mesir Siapkan Lahan Kilang Sawit

05 NUSANTARA
Komnas HAM Sebut MBG Langgar HAM, Pemerintah Menolak

10 LISTSTYLE
Rompi Jadi Andalan Fesyen, dari Atasan hingga Layering

BANDARA RIYADH DALAM ANCAMAN

SERANGAN TEWASKAN 12 ORANG, JEMAAH UMRAH RI DIMINTA CEK JADWAL

Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10) menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 309 lainnya. Insiden ini memperbesar ancaman terhadap penerbangan sipil di kawasan tersebut, ketika sejumlah maskapai mulai membatalkan atau menyesuaikan jadwal penerbangan menuju Arab Saudi.Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyebut korban meninggal terdiri atas empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Sejumlah korban luka dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Serangan itu menjadi yang ketiga menyasar Bandara King Khalid dalam sepekan, setelah dua serangan sebelumnya juga menimbulkan korban dan merusak pesawat komersial Saudi yang berada di landasan.Koalisi militer pimpinan Arab Saudi menuding kelompok Houthi di Yaman sebagai pelaku. Situasi tersebut menjadi perhatian bagi warga negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah yang akan berangkat ke Tanah Suci atau kembali ke Indonesia. Namun, sampai Minggu (11/10), belum ada data terverifikasi yang menunjukkan berapa banyak jemaah Indonesia yang telantar, mengalami perubahan rute, atau gagal berangkat akibat serangan di Riyadh. Tercatat, jumlah WNI di wilayah KJRI Jeddah adalah 527.715 orang dan KBRI Riyadh sebanyak 329.898 orang. Jika digabungkan totalnya mendekati 857 ribu jiwa. Sedangkan, ata-rata jumlah jemaah umrah asal Indonesia tahun 2026 mencapai kisaran 200.000 jemaah per bulan.**BERSAMBUNG HAL.11**

RATA-RATA JEMAAH UMRAH INDONESIA PER BULAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun 2026
- 400.000 (Kumulatif s.d. awal tahun)
- 33.333

Tahun 2025
- 1.600.000 (Proyeksi Kemenag)
- 133.333

Tahun 2024
- 1.467.005-1.800.000
- 122.250-150.000

Tahun 2023
- 1.368.616
- 114.051

Tahun 2022
- 1.010.000
- 84.166

KET
- *Jumlah Jemaah (Tahunan)*
- *Rata-Rata per Bulan*

Sumber:Siskopatuh (Kemenag RI)

HOUTHI-ARAB SAUDI
Dari perebutan kekuasaan hingga ancaman bandara

2011 – Krisis Politik Yaman
Arab Spring menggulingkan Ali Abdullah Saleh. Transisi politik gagal meredam konflik.

2014 – Houthi Kuasai Sanaa
Houthi merebut ibu kota Yaman, memaksa Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi meninggalkan negara.

2015 – Saudi Intervensi
Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintahan Hadi dan menghadapi Houthi yang didukung Iran.

Sumber : Berbagai Sumber Diolah

2026 – Konflik Memanas
Serangan lintas perbatasan kembali meningkat. Pada 10 Oktober, serangan di Bandara Riyadh dilaporkan menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Saudi menuding Houthi, yang belum mengaku bertanggung jawab.

2022 – Gencatan Senjata
Gencatan senjata mediasi PBB meredakan pertempuran, tetapi perdamaian permanen tak tercapai.

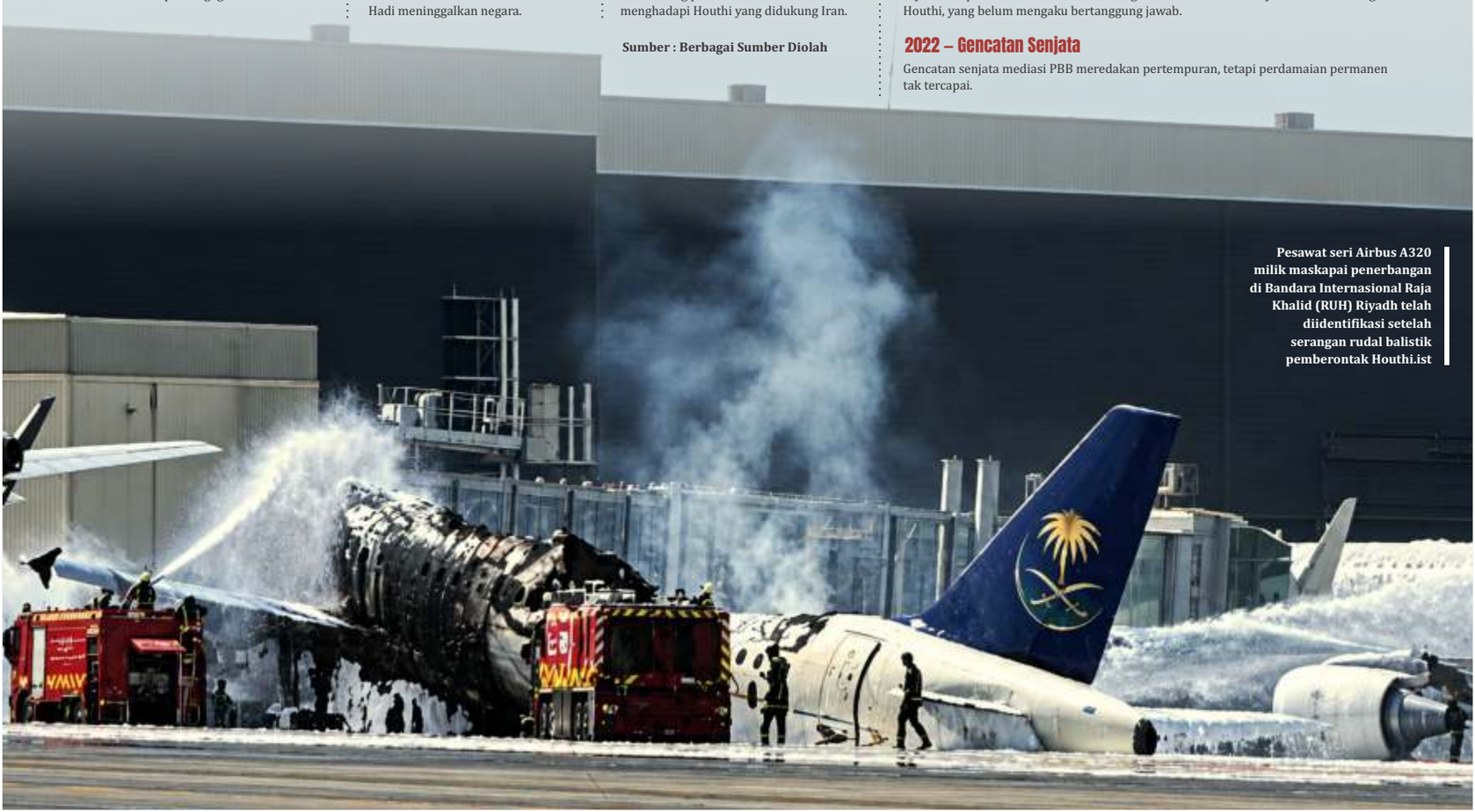

Pesawat seri Airbus A320 milik maskapai penerbangan di Bandara Internasional Raja Khalid (RUH) Riyadh telah diidentifikasi setelah serangan rudal balistik pemberontak Houthi.ist

PRABOWO-EL-SISI BIDIK DANA INVESTASI BERSAMA, MESIR SIAPKAN LAHAN KILANG SAWIT

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mendorong penguatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, kelautan, dan pendidikan. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026), kedua negara membahas pembentukan dana investasi bersama hingga peluang pembangunan fasilitas pengolahan minyak sawit Indonesia di Mesir.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memeriksa pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026). (ist.antara)

Prabowo mengatakan Indonesia dan Mesir sepakat meningkatkan intensitas konsultasi tingkat tinggi untuk memperkuat koordinasi politik. Di bidang ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) guna memperluas akses pasar, membuka peluang investasi, dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha.

Kedua negara juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund melalui lembaga investasi masing-masing untuk mendukung proyek-proyek strategis. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga dana kekayaan Mesir. Namun, ia belum menyebutkan secara spesifik lembaga yang akan menjadi mitra Danantara.

Selain dana investasi bersama, Mesir berminat bekerja sama dalam pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Rosan mengatakan Mesir telah menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas penyulingan (refinery) minyak sawit. Mesir selama ini menjadi salah satu importir minyak sawit Indonesia. Meski demikian, nilai investasi dan jadwal pembangunan fasilitas tersebut belum diumumkan.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperkuat industri pertahanan dan meningkatkan kapasitas prajurit. Sementara itu, kerja sama kelautan dan perikanan diarahkan pada konservasi sumber daya laut serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).

Pendidikan juga menjadi agenda pembahasan. Prabowo menyebut hubungan Indonesia dengan Universitas Al-Azhar telah terjalin lama dan ingin ditingkatkan. Pengajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia di universitas tersebut menjadi salah satu bentuk perkembangan hubungan akademik kedua negara.

Prabowo menyambut tawaran tambahan beasiswa dari Mesir, terutama untuk bidang kedokteran, teknik, dan sains. "Kami terima kasih, apresiasi tawaran Mesir untuk memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains," ujarnya.

Ia juga mendorong pertukaran mahasiswa, kemitraan antaruniversitas, riset bersama, serta kehadiran lembaga pendidikan Mesir di Indonesia melalui pengiriman dosen dan tenaga pendidik. El-Sisi menyatakan Mesir siap menyambut mahasiswa Indonesia untuk belajar di Universitas Al-Azhar maupun perguruan tinggi lainnya di negaranya.

Sejumlah agenda ekonomi dalam pertemuan tersebut masih berupa dorongan pembentukan kemitraan dan penjajakan investasi. Tindak lanjut berupa perjanjian definitif, nilai investasi, dan jadwal pelaksanaan akan menjadi penentu realisasi rencana kerja sama kedua negara.

Kompak soal Palestina Merdeka

Di sisi lain,Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina dan menegaskan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina merdeka.

Prabowo menyatakan ke-prihatinan atas kekerasan, operasi militer Israel, pelanggaran hukum internasional, serta tindakan yang dinilai melanggar hak asasi manusia dan mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Ia menyoroti dampak konflik terhadap warga yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua.

"Orang tua, wanita, anak-anak kecil yang terus menjadi korban tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan," kata Prabowo dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Ia secara khusus mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel dan tindakan yang dinilai semakin memperburuk situasi. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpandangan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

Indonesia dan Mesir juga berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap proses perdamaian serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Komitmen itu mencakup dukungan terhadap pemulihan dan rekonstruksi Gaza yang mengalami kehancuran akibat perang.

El-Sisi menyebut persoalan Palestina sebagai salah satu pembahasan penting dalam pertemuannya dengan Prabowo. Menurut dia, penyelesaian konflik secara menyeluruh diperlukan untuk menciptakan perdamaian sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Kedua pemimpin mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan batas wilayah berdasarkan garis 4 Juni 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. El-Sisi menegaskan bahwa penyelesaian tersebut merupakan jalan untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif.

Dukungan terkait Sungai Nil

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir mengamankan hak atas air Sungai Nil. Hal ini dinilai penting karena terkait kepastian akses air bagi negara-negara di kawasan Afrika.

Prabowo menegaskan persoalan hak atas air harus diselesaikan dengan menghormati hukum internasional. Ia menyatakan keprihatinan terhadap kemungkinan tindakan yang dapat mengurangi hak suatu bangsa untuk memperoleh kepastian sumber air.

"Kami sangat prihatin apabila ada pemikiran-pemikiran untuk melanggar hukum internasional, untuk mengurangi hak bangsa untuk mendapat kepastian sumber air," kata Prabowo dalam pernyataan pers bersama kedua kepala negara.

Ia menambahkan, Indonesia berharap semua pihak mengutamakan kepentingan bersama dalam menyelesaikan persoalan sumber daya air di kawasan tersebut. "Kami dalam hal ini berharap semua pihak untuk meningkatkan kepentingan bersama untuk kawasan tersebut dan kami akan mendukung upaya-upaya Mesir untuk mengamankan hak-hak airnya," ujarnya.

El-Sisi menegaskan pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan masyarakat Mesir. Sungai tersebut menjadi sumber air utama bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan berbagai aktivitas ekonomi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Karena itu, pemerintah Mesir menempatkan kepastian pasokan air sebagai persoalan strategis nasional. (gus,rls,ant, ist/dya)

PARTAI POLITIK TERBELAH MENYIKAPI WACANA PEMAKZULAN GIBRAN

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menguji sikap partai-partai politik di parlemen. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026, sejumlah partai meminta polemik dihentikan, sementara yang lain memilih mengkaji putusan sebelum menentukan sikap. Ada pula yang menekankan perlunya mekanisme konstitusional jika persoalan tersebut hendak dibawa ke ranah politik.

Perbedaan respons itu muncul setelah MK menyatakan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Perkembangan ini kemudian diikuti rencana para penggugat, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, untuk menemui fraksi-fraksi DPR, MPR, DPD, dan sejumlah partai politik. Mereka ingin mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran. Denny menyatakan pihaknya sedang menyiapkan surat permohonan audiensi kepada lembaga

Denny mengatakan, pihaknya tengah menyusun surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR.

"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi, kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR," ujar Denny Minggu (11/10/2026).

Selain DPR dan MPR, Denny berencana menemui sejumlah partai politik untuk mengetahui sikap mereka terhadap putusan MK tersebut.

Salah satu partai yang ingin ditemui adalah PDI Perjuangan (PDIP).Denny menilai upaya mendorong pemakzulan Gibran melalui DPR akan sulit berjalan tanpa adanya desakan publik.

"Saya khawatir proses yang dicoba dorong oleh Mahkamah Konstitusi melalui DPR, pemakzulan ini, tidak akan ke mana-mana. Kecuali rakyat melakukan gerakan dan desakan yang memang kuat, masif, dan betul-betul efektif," jelas Denny.

Ia juga ingin mengetahui sikap partai-partai politik terhadap

Wapres Gibran Rakabuming Raka (Setwpres)

persoalan syarat pendidikan Gibran. Secara khusus, Denny mempertanyakan posisi PDIP yang sebelumnya pernah menjadi partai politik tempat Joko Widodo bernaung.

Dari PDI Perjuangan, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo meminta perhatian pemerintah diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menyoroti dampak kabut asap yang telah memicu protes dari negara tetangga. "Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera," kata Ganjar, Minggu (11/10/2026).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun juga menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah putusan MK menjadi sorotan publik.

Di sisi lain, sikap tegas untuk menghentikan polemik disampaikan Partai Gerindra. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso meminta masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik menyikapi putusan MK secara bijak. Ia mengimbau agar perdebatan yang berlarut-larut dihentikan dan perhatian diarahkan pada keberlanjutan program pemerintah serta pembangunan nasional.

"Partai Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan ini secara bijak, menghentikan polemik yang berlarut-larut, serta bersatu mendukung keberlanjutan program kerja pemerintah demi menghadapi tantangan ekonomi global dan pembangunan nasional," kata Sugiat.

Berbeda dengan Gerindra, Partai Golkar menilai tindak lanjut persoalan tersebut perlu mempertimbangkan jalur politik dan mekanisme konstitusional. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut keputusan mengenai pemakzulan bergantung pada kesepakatan pimpinan partai politik di parlemen. Menurut dia, kepentingan rakyat, martabat bangsa, dan kedaulatan negara harus menjadi pertimbangan utama.

Doli juga mengusulkan agar Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta penjelasan mengenai verifikasi persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024. Ia menilai klarifikasi tersebut dapat dilakukan tanpa harus membentuk panitia khusus (pansus) atau menggunakan hak angket. Jika proses politik berlanjut ke pemakzulan, menurut Doli, DPR dapat menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sesuai ketentuan konstitusi.(wid,ist,kum/dya)

Kepala Bakom Minta Tetap di Jalur Hukum

KEPALA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, meminta wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap ditempuh melalui mekanisme hukum. Ia mengingatkan agar ketidakpuasan terhadap persoalan yang menyeret nama Gibran tidak berkembang menjadi instabilitas di luar koridor hukum.

"Yang kita memang melihat ini kalau memang ada instabilitas yang diciptakan oleh ketidakpuasan, ya itu jangan di luar jalur-jalur hukum," ujar Syahganda dikutip Minggu (11/10).

Syahganda juga meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah SMA atau sederajat milik Gibran. Menurut dia, putusan tersebut menegaskan Gibran tidak dapat didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Meski demikian, ia mengakui putusan itu masih memunculkan penafsiran lain di tengah masyarakat.

Terkait langkah lanjutan atas polemik tersebut, Syahganda menyebut persoalan itu dapat bergulir melalui jalur politik maupun mekanisme hukum lainnya, sesuai dengan kewenangan lembaga yang menangani. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hubungan antarcabang kekuasaan, terutama antara eksekutif dan yudikatif.

"Ya, yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif," katanya. Syahganda juga menegaskan Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden sehingga status jabatannya harus menjadi pertimbangan dalam menyikapi polemik yang berkembang.

Syahganda turut menyoroti tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asy'ari, yang menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya. Ia menilai tindakan tersebut kurang tepat karena Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. "Tapi kalau anggota DPRD kan dia kan makan dari gaji negara, itu aja," ujarnya.

Pernyataan Syahganda muncul di tengah berlanjutnya perdebatan mengenai polemik ijazah Gibran dan desakan agar lembaga politik mengambil sikap. Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan DPR bersikap terhadap persoalan tersebut. Namun, wacana pemakzulan tetap harus dibedakan dari kritik politik karena pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.(tin,ist/dya)

HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

RELAWAN KARHUTLA MENYERAH, DIMANA PEMERINTAH?

Tim relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, memyerah. Mereka menarik seluruh anggotanya dari upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Pemerintah didesak memperkuat penanganan kebakaran, terutama di zona inti yang menjadi habitat orangutan dan sulit dijangkau melalui jalur darat.

Keputusan tersebut disampaikan salah satu perwakilan YOHK-HPI Kobar, Moncos, melalui video yang diunggah ke media sosial pada Minggu (11/10/2926l). Penarikan personel dilakukan setelah sejumlah pihak menyepakati penghentian sementara kegiatan pemadaman di lapangan. Relawan menilai upaya yang telah dilakukan belum menunjukkan perubahan signifikan, sementara kemampuan mereka untuk menghadapi kobaran api sudah mencapai batas.

"Untuk saat ini saya menarik diri dulu, karena kalau dilanjutkan percuma, tidak ada perubahan yang signifikan," kata Moncos.

Moncos mengatakan relawan membutuhkan dukungan pemadaman melalui udara untuk menjangkau titik api di zona inti taman nasional. Menurut dia, upaya pemadaman secara langsung yang dilakukan relawan belum cukup untuk mengatasi kebakaran di kawasan tersebut. "Kami minta cuma water bombing untuk membantu memadamkan api yang berada di zona inti," ujarnya.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin sampai di batas kemampuan kami. Makanya kami memohon pemerintah segera mendatangkan water bombing," kata Moncos. Selain keterbatasan sarana operasional, ia menyoroti minimnya perhatian dan kejelasan dari instansi terkait maupun para wakil rakyat terhadap penanganan kebakaran. Penarikan relawan, menurut dia, bukan berarti ancaman kebakaran telah berakhir, melainkan desakan agar pemerintah mengambil langkah yang lebih efektif.

Moncos menyebut luas kawasan terdampak diperkirakan sekitar 54 ribu hektare. Namun, angka itu masih berupa perkiraan dan belum dapat dipastikan sebagai luas lahan yang terbakar. "Informasi saya kurang lebih 54 ribu hektare, bisa kurang dan bisa lebih, karena itu cuma perkiraan saja," ujarnya.

Angka tersebut perlu dibedakan dari data luasan kebakaran yang telah disampaikan pengelola taman nasional sebelumnya.

Pada 9 September 2026, Kepala Balai TNTP Yohan Hendratmoko menyebut luas kawasan yang terbakar di wilayah taman nasional yang masuk administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai sekitar 1.200 hektare. Kebakaran saat itu teridentifikasi di wilayah Desa Sungai Cabang dan Tanjung Pulau.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti kawasan Kota Jambi, Jambi, Sabtu (10/10). Ant

Petugas bersama mitra berupaya memadamkan api sekaligus membuat penghalang untuk mencegah kobaran meluas. Laporan lain pada September juga mencatat luasan terdampak yang berbeda berdasarkan wilayah dan cakupan pendataan. Karena itu, angka 54 ribu hektare yang disampaikan relawan belum bisa disamakan dengan luas lahan yang terverifikasi terbakar.

Desakan relawan muncul ketika operasi pemadaman udara masih menghadapi kendala. BNPB membenarkan kebakaran terjadi di kawasan TNTP dan menyebut asap tebal membuat jarak pandang rendah sehingga menghambat operasi helikopter water bombing.

"Memang benar di Taman Nasional tersebut terjadi kebakaran," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Ia menjelaskan, "Kendala karena visibility rendah jadi pemadaman lewat udara/heli WB terhambat," seperti dikutip pada Minggu (11/10/2026).Di sisi lain, operasi water bombing sebenarnya telah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan kawasan TNTP. Hingga 10 Oktober 2026, sekitar 574 ribu liter air dilaporkan telah dijatuhkan untuk membantu pemadaman. (tin,ist,kum/dya)

Pemerintah Siapkan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove

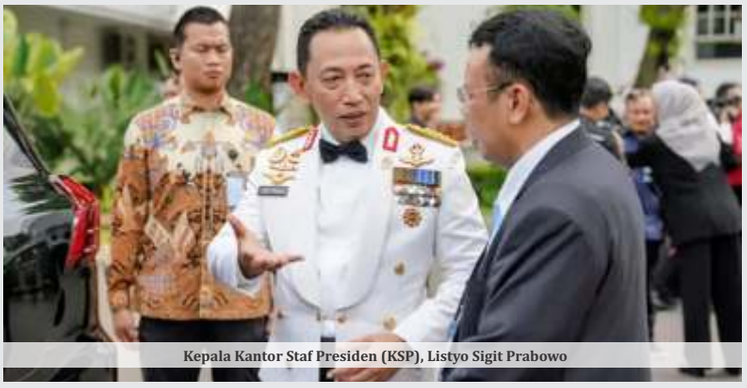

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Listyo Sigit Prabowo

Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, badan tersebut dirancang memiliki tugas dan fungsi yang lebih fleksibel, terutama untuk mencegah dan meminimalkan kebakaran.

"Kami sedang mempersiapkan pendirian Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional," kata Listyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (11/10/2026), seperti dikutip Tempo. Ia mengatakan lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menangani karhutla.

Rencana itu menjadi bagian dari serangkaian langkah yang diklaim pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran. Menurut Listyo, penanganan dilakukan melalui satuan tugas (satgas) udara dan darat, disertai sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta perbaikan regulasi.

"Mulai dari satgas udara, satgas darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi," ujar Listyo.

Mantan Kapolri tersebut mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat untuk bekerja bersama menangani kebakaran. Pemerintah juga terus memantau perkembangan di lapangan dan mengkaji strategi agar api segera padam serta dampaknya dapat ditekan.

"Yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian Karhutla," kata Listyo.

Namun, kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan dasbor penanganan karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 10 Oktober 2026, terdapat 6.414 titik panas (hotspot) dan 195 titik kebakaran (fire spot) di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.(tin,ist/dya)

KOMNAS HAM SEBUT MBG LANGGAR HAM, PEMERINTAH MENOLAK

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) keliru dan tidak akurat. Pemerintah beralasan, pelaksanaan program untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) tidak bisa dinilai dengan pendekatan yang sama seperti pelanggaran hak sipil dan politik.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, mengatakan MBG merupakan salah satu upaya negara memenuhi hak masyarakat atas pangan dan kebutuhan dasar. Karena itu, menurut dia, munculnya persoalan dalam pelaksanaan program tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan sebagai pelanggaran HAM ketika ada dinamika yang terjadi dalam implementasi pemenuhan hak-hak ekosob. Cara penilaian pelanggaran HAM untuk hak-hak ekosob berbeda dengan cara penilaian pelanggaran HAM untuk hak-hak sipil dan politik," kata Munafrizal dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/10/2026).

Munafrizal menjelaskan, pemenuhan hak ekosob mengacu pada prinsip progressive realization atau realisasi hak secara progresif. Prinsip ini mengharuskan negara menunjukkan iktikad baik dan melakukan upaya nyata untuk memenuhi hak warga secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.

Menurut dia, MBG merupakan bentuk upaya pemerintah menjalankan kewajiban tersebut.

Sebaliknya, ia menilai pelabelan pelanggaran HAM terhadap setiap persoalan dalam pelaksanaan program berpotensi menghambat upaya pemenuhan hak masyarakat. "Jika pemenuhan hak-hak ekosob menghadapi masalah dan tantangan dalam implementasinya, kemudian dinilai melakukan pelanggaran HAM, maka ini justru dapat menghalangi terwujudnya pemenuhan hak-hak ekosob," ujarnya.

Pernyataan tersebut merespons kesimpulan Komnas HAM pada Kamis (8/10/2026) yang menyatakan pelaksanaan MBG telah memunculkan empat bentuk pelanggaran HAM. Keempatnya meliputi pelanggaran hak atas kesehatan dan pangan yang layak; pelanggaran hak anak serta pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak; pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta rasa aman; dan pelanggaran hak atas pemulihan yang efektif serta pembiaran hukum.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan persoalan MBG tidak semata-mata berkaitan dengan kendala operasional. "Komnas menemukan bahwa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program MBG bukan hanya permasalahan tata kelola dan kendala operasional, namun telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Pramono dalam konferensi pers pada 8 Oktober 2026.

Komnas HAM menyoroti persoalan tata kelola, keamanan pangan, kualitas gizi, pengawasan, serta pemenuhan hak penerima manfaat.

Temuan tersebut didasarkan pada kajian dengan pendekatan instrumen HAM, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, serta permintaan keterangan dari ahli dan organisasi masyarakat sipil.

Pengamatan dilakukan antara lain di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat. Komnas HAM juga meninjau sejumlah sampel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang menjalankan pelayanan penyediaan makanan dalam program MBG.

Komnas HAM kemudian mengajukan enam rekomendasi perbaikan, mencakup penajaman sasaran penerima manfaat dengan memprioritaskan kelompok rentan, peningkatan kualitas gizi dan keamanan pangan, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta perlindungan pekerja SPPG.

Komnas HAM juga meminta penegakan hukum yang adil, transparan, dan independen atas pelanggaran keamanan pangan, persoalan lingkungan hidup, maupun dugaan korupsi. Pemulihan hak korban dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan turut menjadi bagian dari rekomendasi tersebut.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM itu juga menekankan perlunya tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program secara terukur, termasuk menekan kejadian keracunan, memperjelas target penerima manfaat, dan memperbaiki koordinasi lintas sektor. (tin,rls,ant/dya)

Kondisi lokasi penyimpanan motor listrik MBG. Tampak deretan panjang motor listrik Emmo JVX GT berwarna biru-hitam tersusun rapi. Sebagian besar kendaraan jenis trail dan matik itu masih terlihat baru karena terbungkus plastik. (dok.ist)

Kerugian Korupsi Motor Listrik MBG Rp863,8 M, 5 Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa

Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Minggu (11/10/2026). Perkara ini diduga merugikan keuangan negara Rp863,8 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pelimpahan tahap II dilakukan penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Penyerahan tersebut menandai beralihnya penanganan perkara dari penyidikan ke tahap penuntutan.

"Tim penyidik melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT pada tata kelola program MBG," kata Anang dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Kerugian negara sebesar Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 5 Oktober 2026. Kejagung menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) dalam tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 2025–2026.

Lima tersangka yang dilimpahkan terdiri atas Kolonel Cpl Budi Utomo, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); Andri Mulyono selaku komisaris PT YAT; Yenna Yuniana selaku direktur PT YAT; serta AA dan GB yang disebut menjabat sebagai direktur PT ASE. Budi Utomo masih berstatus anggota TNI aktif sehingga penanganan perkaranya dilakukan melalui mekanisme koneksitas.

Penyidik mengungkap pengadaan sebanyak 19.269 unit motor listrik, terdiri atas 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau motor bebek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit skuter atau motor bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Dengan demikian, total kendaraan yang dilaporkan tanpa baterai mencapai 5.585 unit.(wid,ist/dya)

Kerugian Akibat Kebakaran di Kota Malang **Tembus Rp2,16 Miliar**

Ilustrasi: Petugas UPT Damkar Kota Malang melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan di kawasan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang. (foto: UPT Damkar Kota Malang)

MALANG- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang mencatat 116 kejadian kebakaran sepanjang Juli- September 2026. Dari jumlah tersebut, estimasi total kerugian mencapai Rp2,168 miliar. Dari jenisnya, lahan menjadi objek kebakaran yang paling banyak dilaporkan.

"Sebanyak 74 kejadian atau sekitar 64 persen dari total laporan merupakan kebakaran lahan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kategori objek kebakaran lainnya," ujar Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizki Dharmawan, melalui keterangan resminya, Minggu (11/10/2026).

Selain kebakaran lahan, Pandu menyebut, objek kebakaran yang tercatat meliputi fasilitas umum sebanyak 16 kejadian, rumah dan permukiman sebanyak 10 kejadian, gedung instansi pemerintah 3 kejadian, serta pertokoan atau kios 3 kejadian. "Kebakaran industri dan kendaraan roda empat masing-masing tercatat dua kejadian," katanya.

Tak hanya itu, menurut Pandu, kebakaran restoran, instalasi listrik, pergudangan, kendaraan roda dua, dan kategori lainnya juga masuk dalam laporan UPT Damkar Kota Malang.

Lebih lanjut, dari sisi sebaran wilayah, Kecamatan Kedungkandang mencatat estimasi kerugian terbesar, yakni Rp884 juta. Kemudian Kecamatan Blimbing sebesar Rp341 juta, Lowokwaru Rp219 juta, Klojen Rp215 juta, Sukun Rp159 juta, serta kategori perbantuan di luar wilayah kerja (WMK) sebesar Rp350 juta.

"Jika dilihat dari nilai aset yang berhasil diselamatkan, kamimemperkirakan totalnya mencapai Rp6,504 miliar. Kecamatan Kedungkandang menjadi wilayah dengan estimasi nilai aset terselamatkan tertinggi, yakni Rp2,645 miliar," ungkap Pandu.

Sementara itu, berdasarkan waktu kejadian, Pandu menyebut, September menjadi bulan dengan jumlah kebakaran tertinggi selama Triwulan III 2026. Sebanyak 66 kejadian tercatat pada bulan tersebut, meningkat dibandingkan Agustus yang mencapai 28 kejadian dan Juli sebanyak 22 kejadian.Dari sisi penyebab, laporan UPT Damkar mencatat 50 kejadian atau 42 persen berkaitan dengan sabotase atau ke-sengajaan, sedangkan 24 kejadian atau 21 persen disebabkan perambatan api atau panas. Sebanyak 19 kejadian atau 16 persen masih dalam penyelidikan.

Penyebab lainnya meliputi kelalaian atau kecerobohan sebanyak 10 kejadian, korsleting listrik delapan kejadian, penyalaan mandiri tiga kejadian, kerusakan alat atau sistem satu kejadian, serta faktor alam atau hewan yang tidak tercatat sebagai penyebab dalam laporan tersebut.

Laporan yang sama, kata Pandu, juga mencatat 435 korban selamat, enam orang mengalami luka bakar, satu orang mengalami luka fisik, dan satu orang meninggal dunia. "Dengan demikian, total korban yang tercatat dalam kategori tersebut mencapai 448 orang," pungkasnya.(Santi/Dya)

DPRD Malang Bakal Panggil Eksekutif, **Bahas Dampak Proyek SNT ke Warga**

MALANG – DPRD Kabupaten Malang akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas dampak rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Dusun Polaman, Kelurahan Dampit. Warga khawatir, alih fungsi lahan yang selama ini mereka kelola akan menghilangkan sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas lingkungan dan kegiatan kemasyarakatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengatakan pihaknya akan mengundang Dinas Pertanahan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), camat, serta lurah untuk mencari solusi atas aspirasi warga tersebut.

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengundang sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Pertanahan, BKAD, camat, hingga lurah," ujar Zulham, Minggu (11/10/2026).

Salah satu opsi yang akan dikaji adalah melibatkan warga sekitar dalam aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah, seperti pengelolaan kantin atau koperasi. Langkah itu diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi meskipun pemanfaatan lahan berubah.

"Kami cari solusinya. Mungkin atau tidak apabila warga nanti dilibatkan dalam bagian dari SNT. Misalnya entah itu di kantin, entah itu koperasi yang sifatnya bisa mengembalikan manfaat ekonomi ke warga secara keseluruhan," tuturnya.

Zulham menjelaskan, lahan eks bengkok milik pemerintah yang selama ini dikelola warga ditanami tebu. Hasilnya digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas lingkungan dan membiayai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan lahan tersebut, menurut dia, tidak ditujukan untuk kepentingan perseorangan, melainkan manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat berdasarkan pembagian wilayah rukun tetangga (RT).

Sebelumnya, perwakilan warga Dusun Polaman, Yasin, menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Malang, Rabu (7/10/2026). Ia menyebut lahan eks bengkok milik Pemerintah Kabupaten Malang yang selama ini dikelola warga diperkirakan seluas 21 hektare. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh dua wilayah rukun warga (RW), masing-masing mencakup 11 RT dan 10 RT. Hasil pengelolaannya antara lain digunakan untuk pembangunan jalan serta membiayai kegiatan sosial dan keagamaan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok. (Santi/Lentera)

Yasin mengatakan, warga pada dasarnya mendukung program pemerintah, tetapi meminta kejelasan mengenai perubahan pemanfaatan lahan dan solusi atas potensi hilangnya sumber pendanaan kegiatan lingkungan. Ia juga menilai sosialisasi rencana pembangunan belum berjalan memadai. "Kalau program pemerintah, kami setuju, tapi kami minta ada solusi kebijakannya. Informasi dari Komisi IV (DPRD Kabupaten Malang) yang menjembatani akan ditindaklanjuti. Estimasi 1-2 minggu, jadi kami tunggu saja," ujarnya.

Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan nonasrama yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan jenjang SMP hingga SMA. Program yang menjadi salah satu agenda Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu disebut memiliki alokasi anggaran mencapai Rp300 miliar. Hingga kini, warga Polaman menunggu tindak lanjut pembahasan di DPRD untuk memperoleh kejelasan mengenai rencana pemanfaatan lahan dan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. (Santi/Dya)

TRUMP KESAL GAGAL RAIH NOBEL, KLAIM HENTIKAN 8 PERANG

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mempersoalkan keputusan Komite Nobel Norwegia setelah gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2026. Trump menilai dirinya lebih layak mendapatkan penghargaan tersebut karena mengklaim telah menghentikan delapan perang. Namun, komite justru memilih Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia asal Afrika Selatan.

Trump meluapkan kekesalannya saat menghadiri kampanye Partai Republik di Syracuse, New York, Jumat, 9 Oktober 2026. Acara yang semula ditujukan untuk mendukung kandidat gubernur Partai Republik, Bruce Blakeman, itu turut diwarnai kritik Trump terhadap Komite Nobel dan peraih penghargaan tahun ini. Ia menyebut Pillay sebagai sosok yang tidak dikenal publik dan meragukan kelayakannya menerima Nobel Perdamaian.

"Saya tidak pernah mendengar tentang orang itu. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tapi, selamat buat dia, deh," kata Trump, sebagaimana dikutip Reuters dan Associated Press (AP), Minggu (11/10/2026). Trump juga menyebut Pillay sebagai tokoh liberal yang bekerja di PBB. Ia kemudian memperingatkan Norwegia bahwa keputusan tersebut akan mencoreng reputasi negara itu.

Dalam pidatonya, Trump mengeklaim telah menghentikan delapan perang dan menyebut capaian tersebut seharusnya cukup untuk memberinya Nobel Perdamaian. "Untuk satu dari delapan perang itu saja, harusnya pantas diganjar Hadiah Nobel. Saya hentikan delapan perang. Belum ada presiden yang bisa seperti ini sebelum saya," ujarnya.

Dalam pernyataan lain, Trump juga mengatakan dirinya telah melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan presiden sebelumnya dan menegaskan bahwa ia tidak sedang membual, melainkan menyampaikan fakta menurut versinya.

Sejumlah konflik yang diklaim Trump berhasil diredam mencakup ketegangan antara India dan Pakistan, Korea Utara dan Korea Selatan, serta Jepang dan Korea Utara. Ia juga mengaitkan diplomasi pemerintahannya dengan upaya mencegah China menginvasi Taiwan. Namun, sebagaimana dicatat AP dan Reuters, beberapa konflik yang disebut Trump lebih tepat dipahami sebagai ketegangan yang diklaim berhasil dicegah atau diredakan.

Tingkat keterlibatan Trump dan hasil konkret dari sejumlah upaya tersebut masih diperdebatkan. Karena itu, klaim menghentikan delapan perang tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang seluruhnya telah terverifikasi.

Trump kembali menyerang keputusan tersebut melalui Truth Social. Ia menyebut Amerika Serikat, yang diwakilinya sebagai presiden, semestinya memperoleh penghargaan itu. "Ini adalah noda yang tak dapat terhapuskan bagi Norwegia. Kami tak akan melupakan Norwegia," tulisnya.

Dalam kritik lainnya, Trump menyebut Nobel Perdamaian telah kehilangan kredibilitas akibat keputusan yang menurutnya dipengaruhi segelintir ideolog radikal. Ia juga mengklaim masih berupaya menyelesaikan atau memenangkan dua konflik lainnya.

Kekecewaan itu bukan kali pertama Trump memperlihatkan ambisinya mendapatkan Nobel Perdamaian. Pada 2025, penghargaan tersebut diberikan kepada aktivis demokrasi Venezuela, Maria Corina Machado. Pada Januari 2026, Machado secara simbolis menyerahkan medali Nobel miliknya kepada Trump sebagai bentuk pengakuan atas dukungan terhadap perjuangan kebebasan di Venezuela. Penyerahan simbolis medali itu tidak mengubah status penerima Nobel yang ditetapkan Komite Nobel.

Komite Nobel Norwegia tidak menyebut Trump dalam pengumuman resmi penghargaan tahun ini. Dalam penjelasannya, komite menekankan pentingnya hukum internasional, supremasi hukum, dan pertanggungjawaban atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta genosida. (tin,rtr afp,ist/dya)

Navi Pillay: Melawan Apartheid hingga Mengusut Gaza

Navi Pillay, 85 tahun, meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2026 atas kiprahnya memperjuangkan perdamaian dan penegakan hukum internasional. Hakim dan pejuang hak asasi manusia asal Afrika Selatan itu memiliki rekam jejak panjang, mulai dari melawan diskriminasi rasial pada era apartheid hingga memimpin penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyimpulkan Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.

Komite Nobel Norwegia menyatakan Pillay menunjukkan keberanian dan integritas dalam mendorong tatanan hukum global yang lebih menyeluruh. Ia dinilai berperan penting memastikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diproses melalui mekanisme hukum. Penghargaan itu juga menjadi pengingat pentingnya mempertahankan sistem hukum internasional ketika lembaga-lembaganya menghadapi tekanan.

Pillay menerima kabar tersebut ketika berada di Istana Kehakiman Nuremberg, Jerman, untuk menghadiri konferensi hukum. Tempat itu memiliki arti historis dalam perkembangan peradilan pidana internasional setelah Perang Dunia II, ketika para pemimpin Nazi diadili atas kejahatan yang dilakukan rezim mereka. Saat memberikan tanggapan kepada hadirin, Pillay sempat berkelakar mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berulang kali menyatakan keinginannya memperoleh Nobel Perdamaian.

"Jika Anda bertepuk tangan sedikit lebih keras, mungkin saya akan membagikan penghargaan ini kepada Trump," kata Pillay.

Ucapan itu disambut tawa hadirin dan terekam dalam video yang dibagikan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard. Pillay kemudian mendedikasikan penghargaan tersebut kepada para penyintas kejahatan internasional serta praktisi dan pembela keadilan yang terus memperjuangkan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum.

Lahir di Durban, Afrika Selatan, pada 1941, Pillay berasal dari keluarga keturunan Tamil India. Ia tumbuh ketika sistem apartheid membatasi hak penduduk berdasarkan ras. Pada 1967, ia menjadi perempuan pertama yang membuka praktik hukum di Provinsi Natal.

Setelah apartheid berakhir, ia menjadi perempuan non-kulit putih pertama yang menjabat hakim di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Dalam perjalanan kariernya, ia juga pernah membela Nelson Mandela dan tokoh-tokoh lain yang menentang sistem diskriminasi rasial tersebut.(gus,ist/dya)

Sekilas Tentang NAVI PILLAY

- **Usia:** 85 Tahun (Lahir di Durban, Afrika Selatan, 1941).
- **Fokus Utama:** Hukum Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Anti-Genosida.
- **Dedikasi Penghargaan:** Ia mempersembahkan Nobel ini untuk "seluruh penyintas kejahatan internasional."

Kiprah

- **1967:** Pengacara wanita non-kulit putih pertama yang mendirikan firma hukum di Provinsi Natal, Afrika Selatan.
- **Pembela Nelson Mandela:** Aktif membela hak-hak tahanan politik anti-apartheid di Pulau Robben.
- **1995:** Hakim wanita non-kulit putih pertama di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan.
- **Presiden Pengadilan Rwanda (ICTR):** Menetapkan bahwa pemerkosaan dalam perang adalah bentuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- **Hakim ICC:** Menjadi pilar penegak hukum di Mahkamah Pidana Internasional, Den Haag.
- **Komisaris Tinggi PBB:** Memimpin komando tertinggi penegakan HAM di PBB periode 2008–2014.

LENTERA

Jepang Miliki 107.677 Orang Berusia Seabad, Ini Gaya Hidupnya

Jepang kembali mencatat angka yang menarik soal umur panjang. Jumlah penduduk berusia 100 tahun ke atas di negara itu untuk pertama kalinya menembus angka 100.000 orang.

Data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan terdapat 107.677 orang berusia 100 tahun ke atas pada 2026. Jumlah itu meningkat 7.914 orang dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi rekor tertinggi sejak pencatatan dimulai. Dari jumlah tersebut, 94.298 orang atau sekitar 88 persen adalah perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah 13.379 orang.

Jumlah tersebut sebenarnya merupakan hasil perjalanan panjang. Ketika pemerintah Jepang mulai mencatat penduduk berusia 100 tahun ke atas pada 1963, jumlahnya hanya 153 orang. Angkanya menembus 1.000 pada 1981, kemudian 10.000 pada 1998 dan 50.000 pada 2012.

Pertanyaannya, apa yang membuat begitu banyak orang Jepang dapat mencapai usia tersebut?

Tidak ada satu kebiasaan yang bisa disebut sebagai penyebab tunggal. Pemerintah Jepang sendiri menyebut sejumlah faktor, mulai dari membaiknya lingkungan hidup, pola makan dan status gizi, hingga kemajuan teknologi serta layanan medis. Namun, sejumlah karakter gaya hidup masyarakat Jepang memberikan beberapa pelajaran sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih Sering Berjalan Khaki

Salah satu kebiasaan yang mudah ditiru adalah memperbanyak aktivitas fisik ringan dalam rutinitas harian.Aktivitas fisik masyarakat Jepang tidak selalu berbentuk olahraga di pusat kebugaran. Berjalan kaki untuk menuju stasiun, menggunakan transportasi umum, bersepeda atau melakukan pekerjaan rumah dapat membuat tubuh tetap aktif.

Kebiasaan semacam ini penting karena aktivitas fisik tidak harus selalu berupa latihan intensif. Jalan kaki secara rutin, misalnya, dapat menjadi cara sederhana untuk mengurangi waktu yang dihabiskan dalam posisi duduk.Prinsipnya sederhana jangan menunggu waktu khusus untuk bergerak.

Lebih Banyak Makanan Utuh

Pola makan tradisional Jepang sering dikaitkan dengan umur panjang. Makanan sehari-hari secara umum mencakup ikan, sayuran, nasi, kedelai dan berbagai makanan berbasis fermentasi.Pakar menyebut pola makan masyarakat Jepang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap umur panjang. Masyarakat Jepang juga secara historis mengonsumsi lebih sedikit lemak jenuh dibandingkan sejumlah negara Barat.Namun, meniru pola makan Jepang bukan berarti setiap orang harus mengubah menu menjadi makanan Jepang.

Prinsip yang lebih mudah diterapkan adalah memperbanyak makanan yang minim proses. Mulai dari sayur, buah, ikan, kacang-kacangan dan sumber protein yang beragam, sekaligus membatasi makanan ultra-proses, gula berlebih dan lemak jenuh.Dengan kata lain, yang perlu ditiru bukan semata-mata jenis masakannya, melainkan pola makan yang lebih seimbang.

Jangan Menunggu Tua

Salah satu kesalahan dalam membicarakan umur panjang adalah menganggap kesehatan lansia hanya ditentukan ketika seseorang sudah lanjut usia.Padahal, kebiasaan yang dilakukan selama puluhan tahun sebelumnya ikut membentuk kondisi tubuh pada usia tua.Karena itu, aktivitas fisik sebaiknya dibangun sebagai rutinitas sejak usia muda. Tidak harus langsung olahraga berat. Jalan kaki, bersepeda, peregangan, berkebun atau melakukan pekerjaan rumah secara aktif dapat menjadi bagian dari rutinitas.Yang terpenting adalah konsistensi.

Pertahankan Hubungan Sosial5

Ada satu faktor yang sering luput ketika pembicaraan tentang umur panjang hanya berfokus pada makanan dan olahraga: hubungan dengan orang lain.

Kehidupan sosial yang aktif dapat membantu menjaga kesejahteraan seseorang ketika memasuki usia lanjut. Berkumpul dengan keluarga, bertemu teman, mengikuti kegiatan komunitas atau tetap memiliki aktivitas sosial dapat membuat seseorang tidak sepenuhnya terisolasi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menempatkan hubungan sosial sebagai bagian penting dari kesehatan. Komisi WHO tentang Koneksi Sosial menyebut kesepian dan isolasi sosial memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan, serta mendorong masyarakat membangun hubungan sosial yang lebih kuat.

Artinya, menjaga kesehatan tidak hanya soal menghitung langkah atau kalori. Memiliki orang untuk diajak berbicara juga merupakan bagian dari kehidupan yang sehat.

Menteri Kesehatan Jepang Kenichiro Ueno mengatakan peningkatan jumlah lansia berkaitan antara lain dengan membaiknya lingkungan hidup, makanan dan gizi serta kemajuan teknologi medis. Pemerintah juga menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan sistem jaminan sosial ketika jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah(far,ist/dya)

Saking Lebatnya Hutan Pulau Vostok Jadi 'Segitiga Hitam Misterius' di Google Maps

Sebuah daratan berbentuk segitiga di tengah Samudra Pasifik pernah menghebohkan pengguna internet karena tampak seperti lubang hitam dalam citra Google Maps. Sempat dikaitkan dengan pangkalan militer rahasia dan dugaan sensor, wilayah tersebut ternyata Pulau Vostok, atol tak berpenghuni yang tertutup hutan Pisonia sangat rapat.

Fenomena itu bermula pada 2021 ketika seorang pengguna internet menemukan area berbentuk segitiga dengan warna sangat gelap di tengah hamparan laut. Tangkapan layar Google Maps tersebut kemudian menyebar di media sosial dan memancing rasa penasaran warganet.

Keanehan citra itu terletak pada kontras warnanya. Perairan di sekeliling pulau terlihat jelas, tetapi bagian daratannya tampak nyaris hitam pekat. Sebagian pengguna menduga Google sengaja menyensor wilayah tersebut karena menyimpan fasilitas rahasia, bahkan ada yang menghubungkannya dengan pangkalan militer tersembunyi.

Namun, penjelasannya ternyata jauh lebih alami. Area gelap itu bukan lubang misterius ataupun objek yang sengaja ditutupi, melainkan tutupan vegetasi yang sangat lebat di Pulau Vostok, wilayah Republik Kiribati di Samudra Pasifik.

Poho Pisonia

Pulau Vostok merupakan bagian dari gugusan Line Islands yang masuk wilayah Kiribati. Luas daratannya relatif kecil, sekitar 24 hektare, dengan bentuk menyerupai segitiga. Pulau karang ini tidak berpenghuni dan sebagian besar permukaannya tertutup hutan pohon Pisonia (Pisonia grandis).Data dalam Directory of Wetlands of Kiribati yang diterbitkan Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) mencatat, pepohonan Pisonia di pulau tersebut dapat tumbuh hingga sekitar 30 meter. Vegetasinya berkembang rapat di atas tanah gambut lembap dengan ketebalan mencapai satu meter.

Kerapatan tajuk pohon membuat bagian tengah pulau hampir tidak terlihat dari citra satelit. Warna hijau gelap vegetasi yang saling menutupi menciptakan ilusi visual seperti lubang hitam. Dengan demikian, perbedaan warna pada Google Maps bukan bukti adanya penyensoran.

Di balik penampilannya yang misterius, Vostok menyimpan ekosistem yang menarik. Pulau ini menjadi tempat singgah dan berkembang biak berbagai burung laut, termasuk great frigatebird, brown noddy, white tern, serta beberapa jenis booby.

Pepohonan Pisonia memiliki peran penting bagi kehidupan burung karena menyediakan tempat bertengger dan bersarang. Namun, buah pohon ini memiliki biji yang dilengkapi struktur lengket. Biji dapat menempel pada bulu burung dan dalam kondisi tertentu membuat burung kesulitan melepaskan diri.

Kondisi tersebut menjadikan Pisonia dikenal pula dengan sebutan bird-catcher tree atau pohon penangkap burung. Fenomena ini merupakan bagian dari interaksi ekologis antara tumbuhan dan burung di pulau-pulau tropis.

Keberadaan satwa laut juga menarik perhatian peneliti. Ekspedisi National Geographic yang dipimpin ahli konservasi kelautan Enric Sala pernah mengeksplorasi kawasan terpencil di sekitar Line Islands. (far,ist/dya)

HARIAN LENTERA TODAY Inspirasi Perubahan

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA,MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I SIDOARJO:** TEGUH A **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** AIS **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) **I MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. **I TRENGGALEK:** HERLAMBANG **I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN,FADHILA **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26,JL TENGGILIS TENGAH 4 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Pembaca

Rompi Jadi Andalan Fesyen, dari Atasan hingga Layering

Rompi atau vest kembali mendapat tempat dalam lemari pakaian perempuan pada 2026. Bukan lagi sekadar pelengkap setelan jas atau busana formal, rompi kini bisa berdiri sendiri sebagai atasan, dipakai sebagai luaran, maupun menjadi bagian dari permainan layering.

Dalam ulasan tren mode 2026 mencatat, vest dan waistcoat semakin fleksibel digunakan. Keduanya memang kerap dianggap sama, meski secara tradisional waistcoat lebih dekat dengan rompi berstruktur dan formal, sementara vest memiliki cakupan desain yang lebih kasual.

Perbedaan itu kini semakin kabur. Di panggung mode internasional, rompi justru digunakan untuk mempertemukan unsur tailoring, kasual dan gaya personal.

Vogue, misalnya, memasukkan layered vest sebagai salah satu trik styling pada koleksi Fall 2026. Salah satu pendekatannya adalah

mengenakan dua rompi sekaligus dengan warna berbeda, kemudian menambahkan bros dan rok berlipit. Cara ini menunjukkan bahwa rompi tidak lagi harus berdiri sebagai satu lapisan tunggal.

Pada koleksi Oscar Ouyang Fall 2026, waistcoat juga muncul dalam pendekatan yang lebih bebas gender. Desainer tersebut menawarkan rompi yang dapat dikenakan terbuka atau dikancingkan tinggi, baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Siluet Mengikuti Tubuh

Salah satu gaya yang mudah diterapkan adalah rompi berpotongan mengikuti lekuk tubuh. Bukan berarti harus ketat, tetapi struktur pakaian dibuat mengikuti bentuk badan melalui kupnat, jahitan belakang atau tambahan ikat pinggang.

Potongan seperti ini memberikan kesan rapi tanpa harus menggunakan blazer. Pilihan kerah juga menentukan karakter. Kerah model lapel atau kerah yang menyerupai jas membuat rompi terlihat lebih formal dan cocok dipakai ke kantor.

Untuk gaya kerja, rompi bisa dipadukan dengan celana bahan berpotongan lurus atau lebar. Jika ingin lebih santai, gunakan kaus polos atau kemeja putih sebagai lapisan dalam.

Siluet Boxy yang Lebih Modern

Tidak semua rompi harus mengikuti bentuk badan. Siluet boxy justru menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan tampilan lebih santai dan kontemporer.

Potongan ini dapat dibuat tajam dengan konstruksi bahu dan kerah yang tegas. Alternatif lainnya adalah memilih material yang lebih ringan seperti linen sehingga rompi terasa kasual.

Untuk tampilan kantor, rompi boxy bisa dipadukan dengan kemeja dan celana panjang. Sementara untuk akhir pekan, kemeja denim atau kaus sederhana dapat menjadi pasangan yang lebih rileks.

Siluet longgar juga cocok dengan kecenderungan mode 2026 yang semakin mengaburkan batas antara busana kerja dan busana sehari-hari.

Jadi Atasan Utama

Salah satu cara paling sederhana mengenakan rompi adalah menjadikannya atasan.Rompi berkerah atau tailored vest dapat langsung dipakai tanpa kemeja di dalamnya, terutama untuk tampilan yang lebih modern. Padukan dengan celana berpinggang tinggi agar proporsinya terlihat seimbang

Model ini sebenarnya bukan tren yang benar-benar baru. Rompi tanpa lengan telah beberapa kali muncul sebagai pakaian utama dalam gaya jalanan, termasuk dikenakan dengan celana longgar.

Namun pada 2026, pendekatan tersebut semakin mudah diterima karena tailoring perempuan bergerak ke arah yang lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat pada aturan setelan klasik.

Jika ingin tampilan lebih sopan atau cocok untuk suasana profesional, rompi bisa dikenakan di atas blus, kemeja atau kaus tipis.(far,ist/dya)

BANDARA RIYADH DALAM ....dari Hal 1

Juru bicara koalisi, Mayor Jenderal Turki Al Malki, menyebut serangan tersebut menyasar langsung terminal penumpang dan menewaskan maupun melukai penumpang sipil serta pekerja bandara. Ia menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme dan kejahatan perang.

"Komando Pasukan Gabungan Koalisi akan merespons serangan teroris ini secara tegas, terukur, dan tetap berpedoman pada Hukum Humaniter Internasional," kata Al Malki dalam pernyataan yang dikutip Minggu (11/10).

Meski koalisi Saudi menuding Houthi, atribusi pelaku perlu tetap mengikuti perkembangan informasi. Reuters melaporkan kelompok Houthi belum menyatakan bertanggung jawab atas serangan mematikan pada Sabtu tersebut. Karena itu, tudingan koalisi Saudi dan klaim resmi pihak yang diduga menyerang perlu dibedakan dalam pemberitaan.

Otoritas penerbangan sipil Saudi menyatakan seluruh penerbangan dari Riyadh dialihkan dan operasional bandara dihentikan sementara setelah serangan. Bandara tersebut melayani ibu kota Saudi yang berpenduduk sekitar delapan juta orang. Penghentian operasional itu berdampak pada mobilitas penumpang, sementara otoritas melakukan penilaian terhadap kerusakan dan keamanan fasilitas.

Ancaman tidak berhenti pada serangan di Riyadh. Kelompok Houthi kembali memperingatkan maskapai internasional agar menghindari bandara dan ruang udara Arab Saudi, dengan menyebut kawasan tersebut sebagai wilayah operasi militer.

Mereka menyatakan pengecualian untuk wilayah udara di atas Makkah dan Madinah. Pernyataan itu merupakan ancaman dari pihak Houthi, bukan jaminan keamanan bagi penerbangan menuju kedua kota suci tersebut ataupun bukti bahwa semua bandara Saudi ditutup.

WNI Diminta Waspada

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyampaikan bahwa hingga pernyataan mereka diterbitkan, belum ada laporan WNI yang menjadi korban meninggal maupun luka dalam serangan tersebut. Meski demikian, kemungkinan adanya WNI di antara korban luka masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

"Sampai rilis ini dibuat, tidak ada laporan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Informasi mengenai kemungkinan Warga Negara Indonesia di antara korban luka masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut," demikian pernyataan KBRI Riyadh Minggu (11/10).

Gambar dari video yang diperoleh dan diverifikasi oleh AP ini memperlihatkan kepulan asap hitam pekat dan kobaran api yang membubung akibat kebakaran di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada hari Jumat, 9 Oktober 2026. (AP)

KBRI Riyadh juga mengimbau WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kawasan Bandara Internasional King Khalid, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak. WNI yang memiliki jadwal penerbangan diminta mengonfirmasi status dan jadwal keberangkatan langsung kepada maskapai sebelum berangkat menuju bandara.

Untuk keadaan darurat, KBRI menyampaikan nomor 911 bagi wilayah Riyadh, Makkah, Madinah, dan Provinsi Timur atau Eastern Province. Sementara itu, nomor 998 dapat dihubungi untuk wilayah lain di Arab Saudi. WNI juga diimbau mengikuti informasi resmi dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.

Imbauan serupa disampaikan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). Wakil Ketua Umum HIMPUH Bidang Umrah, Fatma Kartika Sari, meminta penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan jemaah yang akan berangkat maupun kembali ke Tanah Air terus memantau status penerbangan.

"Kami mengimbau untuk terus memantau status penerbangannya. Pastikan jadwal penerbangan masih sesuai sebelum menuju bandara," ujar Fatma Minggu (11/10).

Fatma juga mengingatkan PPIU dan jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk mengikuti perkembangan situasi keamanan dan arahan resmi otoritas terkait. Imbauan itu penting karena perubahan jadwal dapat terjadi sewaktu-waktu mengikuti keputusan maskapai dan otoritas penerbangan.

Meski demikian, belum tersedia data terverifikasi mengenai jumlah jemaah umrah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi atau jumlah penerbangan dari Indonesia yang dibatalkan khusus akibat serangan 10 Oktober.

Diketahui, sejumlah maskapai internasional telah melakukan penyesuaian penerbangan menuju kota-kota di Arab Saudi di tengah meningkatnya risiko keamanan. Reuters melaporkan beberapa maskapai membatalkan atau menangguhkan layanan menuju Riyadh setelah rangkaian serangan terhadap bandara tersebut.

Menurut laporan yang dihimpun HIMPUH dari media internasional, Emirates membatalkan tiga penerbangan rute Dubai–Riyadh, yakni EK815, EK819, dan EK817, pada 9–10 Oktober. Etihad membatalkan delapan penerbangan Abu Dhabi–Riyadh, terdiri atas enam penerbangan pada Jumat dan dua pada Sabtu.

Maskapai berbiaya rendah flydubai menangguhkan penerbangan dari Dubai menuju Riyadh dan Yanbu hingga 10 Oktober, serta penerbangan ke Abha hingga 11 Oktober. Air Arabia juga dilaporkan mengalami penundaan penerbangan menuju Riyadh serta pembatalan penerbangan ke Abha dan Tabuk.

Rincian tersebut menunjukkan adanya gangguan pada jaringan penerbangan menuju Arab Saudi. Namun, daftar pembatalan itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh penerbangan tersebut membawa jemaah Indonesia atau bahwa semua penerbangan umrah dari Indonesia mengalami pembatalan. Status penerbangan harus diperiksa berdasarkan maskapai, nomor penerbangan, tanggal keberangkatan, serta bandara tujuan masing-masing.

Dikutip media internasional, gangguan penerbangan sebelum serangan mematikan pada 10 Oktober. Untuk Kamis (8/10), sebanyak 169 dari 378 keberangkatan yang dijadwalkan dan 124 dari 369 kedatangan tercatat dibatalkan atau tidak beroperasi. Secara keseluruhan, 293 dari 747 pergerakan penerbangan dalam data tersebut terdampak.

Bagi jemaah Indonesia, langkah paling penting adalah memeriksa informasi resmi dari maskapai dan PPIU. Jemaah yang belum berangkat sebaiknya memastikan jadwal dan lokasi keberangkatan sebelum menuju bandara. Adapun jemaah yang masih berada di Arab Saudi perlu berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan jadwal, pengalihan rute, akomodasi, dan rencana kepulangan jika terjadi pembatalan.

Ancaman Meluas ke Bandara Lain

Kekhawatiran keamanan juga meluas ke luar Riyadh. Reuters melaporkan adanya insiden proyektil di sekitar Bandara Internasional King Fahd di Dammam, sementara koalisi Saudi menyatakan telah mencegat sebuah pesawat nirawak di wilayah timur pada Minggu.

Rangkaian serangan berlangsung ketika konflik di Yaman kembali meningkat setelah gencatan senjata yang dicapai pada 2022 runtuh. Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, sedangkan Houthi menguasai Sanaa dan sejumlah wilayah lain. Bentrokan kembali meningkat di tengah ofensif pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi.

Reuters melaporkan serangan sebelumnya terhadap Bandara King Khalid pada pekan yang sama menewaskan empat orang dan menyebabkan kerusakan berat pada sebuah pesawat komersial Saudi yang sedang berada di landasan. Serangan pada 10 Oktober kemudian memperbesar jumlah korban dan memperlihatkan kerentanan fasilitas penerbangan sipil di tengah eskalasi militer.

Pemerintah Saudi menyatakan akan memberikan respons terhadap serangan tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington sedang mempertimbangkan kemungkinan bergabung dalam serangan Saudi terhadap Houthi. Pernyataan tersebut belum berarti bahwa Amerika Serikat telah memutuskan untuk ikut melakukan serangan militer.

"Kami mungkin akan melakukannya. Kami akan meninjaunya. Kami baru saja mengetahui tentang serangan baru-baru ini, jadi kami akan mengambil keputusan. Kami bergerak sangat cepat," ujar Trump kepada para wartawan, sebagaimana dikutip oleh Reuters.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa opsi keterlibatan AS masih dipertimbangkan.Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam serangan terhadap bandara tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres juga mengecam serangan pada Sabtu dan menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil serta infrastruktur sipil melanggar hukum internasional dan harus dihentikan.(wid,ryr,ant,rls,ist/dya)

BANJIR BANDANG PADANG:
672 WARGA MENGUNGSI, 120 RUMAH TERENDAM

Banjir bandang menerjang sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (10/10/2026) siang. Hingga Minggu (11/10/2026), sebanyak 672 warga mengungsi ke tenda darurat, musala, dan warung warga. Banjir juga merendam sedikitnya 120 rumah, merusak lima rumah, serta memutus akses jalan di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan banjir melanda tiga kecamatan, yakni Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Luapan air pertama kali dilaporkan dari kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, sekitar pukul 12.52 WIB, setelah hujan deras turun sejak pukul 12.00 WIB.

"Banjir berdampak pada sejumlah wilayah di Kota Padang. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan kerusakan bangunan dan memutus akses jalan di kawasan Guo," kata Hendri, Minggu (11/10/2026).

Dua wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah Kuranji dan Koto Tangah. Di Kecamatan Kuranji, banjir merendam kawasan Guo dan Lapau Munggu, sedangkan di Kecamatan Koto Tangah, luapan air menerjang Perumahan Lumin Park di Kelurahan Lubuk Minturun serta Kampung Apa di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto.

Berdasarkan rincian BPBD, sekitar 60 rumah di Kelurahan Kuranji terendam, disusul 40 rumah di Lubuk Minturun dan 20 rumah di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Lima rumah di Kecamatan Kuranji dilaporkan rusak, terdiri atas empat rumah rusak sedang dan satu rumah rusak berat.

Dampak banjir tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di kawasan permukiman. Akses jalan masyarakat di Guo, tepatnya di sekitar lokasi fasilitas perusahaan daerah air minum (PDAM), terputus total akibat derasnya arus.

Genangan di sejumlah ruas jalan juga menghambat lalu lintas. Dilaporkan jalan di kawasan By Pass, tepat di depan Rumah Sakit Siti Rahma, sempat tidak dapat dilalui. Kemacetan turut terjadi di sekitar pemakaman umum Tunggul Hitam karena kendaraan tidak bisa melintas.

Tim SAR gabungan kemudian dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Sebanyak 238 orang berhasil dievakuasi dari beberapa titik terdampak. Lokasi dengan jumlah evakuasi terbanyak adalah Perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun, tempat petugas menyelamatkan 178 orang. Selain itu, sebanyak 30 orang dievakuasi dari Perumahan Abi di Koto Panjang Ikua Koto, 20 orang dari Lapau Munggu, serta masing-masing lima orang dari kawasan Guo dan Kampung Apa.

Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu (10/10) siang.(ant)

Sebagian warga sempat menyelamatkan diri ke bagian rumah yang lebih tinggi. Rekaman kondisi banjir yang diterima CNN Indonesia memperlihatkan warga naik ke loteng untuk menghindari luapan air sambil meminta pertolongan tim penyelamat.

Hingga Minggu, pengungsi tersebar di tiga lokasi utama di wilayah Kuranji. Sebanyak 367 orang berada di tenda pengungsian di Lapau Munggu dan rumah-rumah warga sekitar, 250 orang berlindung di Musala Ar-Ridwan Kampung Tangah, sedangkan 55 orang lainnya bertahan di Warung Jembatan Guo.

Penanganan darurat melibatkan personel pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Padang, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan. Petugas mengerahkan perahu karet, mobil penyelamat, serta truk serbaguna untuk menjangkau kawasan terdampak. BPBD juga menyoroti kebutuhan perbaikan tanggul yang jebol di aliran Sungai Lapau Munggu, Kuranji, sebagai bagian dari penanganan lanjutan.

Hendri mengingatkan warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai dan kawasan perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan jika hujan deras kembali turun. Menurut dia, pendataan korban terdampak dan kerusakan infrastruktur masih dapat

Usai dilanda banjir bandang, warga mulai beraktivitas di antara rumah-rumah yang rusak di Guo, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Minggu (11/10/2026). (ant)

BMKG Peringatkan Hujan Lebat di 4 Wilayah

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di empat wilayah Indonesia pada Senin (12/10/2026). Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sembilan wilayah lain, disertai ancaman angin kencang di Sulawesi Selatan.

Peringatan tersebut disampaikan BMKG melalui unggahan akun Instagram resmi @infobmkg pada Minggu (11/10/2026). Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, dan Papua. Adapun potensi angin kencang diprakirakan terjadi di Sulawesi Selatan.

Peringatan ini muncul di tengah kondisi cuaca Indonesia yang masih didominasi curah hujan rendah. Dalam rilis resmi pada 8 Oktober 2026, BMKG mencatat 70,59 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah pada Dasarian III September. Pada Dasarian II Oktober, kondisi serupa diprakirakan masih meliputi 66,09 persen wilayah Indonesia.

Meski kondisi kering masih dominan, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer. BMKG mencatat, pada 1–4 Oktober 2026, curah hujan harian mencapai 91 milimeter di Sumatera Utara, 69 milimeter di Sumatera Barat, 67 milimeter di Aceh, dan 54 milimeter di Jawa Barat. Aktivitas gelombang atmosfer, pertemuan angin, serta suhu muka laut yang relatif hangat turut berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

BMKG juga menjelaskan bahwa fenomena El Niño berintensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif memengaruhi kecenderungan berkurangnya pembentukan awan hujan. Kondisi kering tersebut sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Ratusan titik panas sebelumnya terdeteksi di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku.(gus,ist/dya)